

# KABUPATEN GROBOGAN



# RANWAL RENJA 2027

**KECAMATAN KEDUNGJATI**

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 89 B Kedungjati – Grobogan 58167

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029. Renja PD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis.

Renja PD Kecamatan Kedungjati tahun 2027 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Disamping itu Renja PD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Kecamatan Kedungjati tahun 2025-2029 dengan mengacu kepada RKPD Tahun 2026, memuat kebijakan, program dan kegiatan. Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

### **1.2. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja tahun 2027 Kecamatan Kedungjati diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

- o. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15).

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dimaksudkan sebagai pedoman Kantor Kecamatan Kedungjati dalam melaksanakan program kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran.

#### **b. Tujuan**

Prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika naskah Renja Kecamatan Kedungjati tahun 2027 disusun sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

#### **BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

#### **BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Kedudukan Program/Kegiatan PD Tahun Rencana Menurut Rencana Kerja Jangka Menengah

#### **BAB V : PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada dasarnya, semua program dan kegiatan terealisasi. Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Kedungjati, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Kedungjati dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Capaian kinerja Kecamatan Kedungjati tahun lalu adalah sebagai berikut:

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4
<b>KECAMATAN KEDUNGJATI</b>		<b>3.018.493.000</b>	<b>2.923.330.509</b>
<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>		<b>3.018.493.000</b>	<b>2.923.330.509</b>
<b>KECAMATAN</b>		<b>3.018.493.000</b>	<b>2.923.330.509</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Publik</b>	<b>2.940.420.000</b>	<b>2.848.648.509</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan</b>	<b>38.413.000</b>	<b>35.813.000</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.413.000	35.813.000
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dan Perubahan Perilaku Pegawai Dengan Dibayarkannya Gaji Tepat Waktu Dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>2.047.674.000</b>	<b>1.975.133.716</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	2.047.674.000	1.975.133.716
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai Dalam Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai</b>	<b>8.295.000</b>	<b>8.250.000</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	8.295.000	8.250.000
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tercukupinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>218.377.600</b>	<b>216.173.200</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	11.045.000	11.023.500
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95.882.000	94.980.700
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9.994.600	8.941.700
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	32.396.000	32.227.300
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.060.000	69.000.000
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Meningkatnya Kinerja Pegawai</b>	<b>55.621.000</b>	<b>54.998.900</b>

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	55.621.000	54.998.900
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dan Kinerja Pegawai</b>	<b>102.295.400</b>	<b>94.557.883</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	20.100.000	20.100.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	32.057.400	26.659.883
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	50.138.000	47.798.000
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bertambahnya Umur Pakai Barang Milik Daerah dan Terjaganya Aset Kecamatan</b>	<b>469.744.000</b>	<b>463.721.810</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60.124.000	56.393.310
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	400.000.000	398.848.500
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.620.000	8.480.000
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Diberdayakan</b>	<b>16.450.000</b>	<b>15.180.000</b>
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan</b>	<b>16.450.000</b>	<b>15.180.000</b>
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	16.450.00	15.180.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Koordinasi Dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>15.002.000</b>	<b>14.202.000</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional</b>	<b>15.002.000</b>	<b>14.202.000</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.002.000	14.202.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi</b>	<b>46.621.000</b>	<b>45.300.000</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa Yang Dilaksanakan</b>	<b>46.621.000</b>	<b>45.300.000</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	46.621.000	<b>45.300.000</b>



### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Permasalahan–permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada Kantor Camat Kedungjati Kabupaten Grobogan sebagai berikut:

Permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kedungjati dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

**a. Permasalahan Sekretariat**

1. Kurangnya jumlah Personil dalam penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.
2. Kurang memadainya sarana prasarana yang mendukung kegiatan di Kecamatan.
3. Kurangnya kompetensi yang dimiliki personil dalam menjalankan tugas dan fungsi masih kurangnya pengelolaan data dan pengarsipan dokumen.

**b. Permasalahan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

1. menurunnya kesadaran gotong-royong masyarakat.
2. keterlambatan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

**c. Permasalahan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum**

1. Kurangnya Kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Peraturan Daerah.
2. Kurangnya kelengkapan sarana pendukung dalam operasional penegakan Peraturan Daerah.
3. Kurangnya peningkatan Kapasitas dan Ketrampilan anggota Satlinmas yang ada di Masyarakat.

**d. Permasalahan Kesejahteraan Rakyat**

1. Kurangnya koordinasi dalam penyediaan data Kesejahteraan Sosial.

**e. Permasalahan Seksi Pelayanan Umum**

1. Belum optimalnya penerapan SOP maupun SPP dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
2. Kurangnya sarana pendukung yang responsif terhadap perempuan, lansia, dan difabel.

**f. Permasalahan Seksi Tata Pemerintahan**

1. Kurangnya sosialisasi kepada Perangkat Desa terkait penyusunan APBDes dan Laporan Petanggungjawaban APBDes
2. Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa dalam intensifikasi PBB.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

##### a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun di Kecamatan Kedungjati, adalah meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

##### b. Sasaran

Dari tujuan tersebut diatas maka sasaran yang hendak dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kedungjati dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan yang Inovatif dan Modern	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,07	86,27	86,37	86,47	86,57
		Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	67,61	69,29	70,97	72,65	74,33

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

#### 4.1. Kedudukan Program/Kegiatan OPD Tahun Rencana Menurut Rencana Kerja Jangka Menengah

Kedudukan program/kegiatan OPD yang direncanakan merupakan implementasi program/kegiatan dari Rencana Kerja Jangka Menengah. Program/kegiatan OPD diperlukan guna mendukung pelaksanaan arah kebijakan dan program yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 untuk tahun rencana 2026.

Adapun keterkaitan program/kegiatan OPD yang direncanakan pada tahun 2027 dengan RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Publik</b>	<b>APBD</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Musrenbang RKPD di Kecamatan</b>	<b>APBD</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	APBD
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Dan Perubahan Perilaku Pegawai Dengan Dibayarkannya Gaji Tepat Waktu Dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN	APBD
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Disiplin Pegawai Dalam Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai</b>	<b>APBD</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	APBD
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	APBD
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tercukupinya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	APBD
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	APBD
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	APBD
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	APBD
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Meningkatnya Kinerja Pegawai</b>	<b>APBD</b>

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	APBD
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Masyarakat dan Kinerja Pegawai</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	APBD
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	APBD
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	APBD
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Bertambahnya Umur Pakai Barang Milik Daerah dan Terjaganya Aset Kecamatan</b>	<b>APBD</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	APBD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	APBD
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Masyarakat Yang Diberdayakan</b>	<b>APBD</b>
<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan</b>	<b>APBD</b>
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	APBD
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Fasilitas Koordinasi Dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>APBD</b>
<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional</b>	<b>APBD</b>
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	APBD
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Dengan Tertib Administrasi</b>	<b>APBD</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Terlaksananya Kegiatan Lomba Desa Yang Dilaksanakan</b>	<b>APBD</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	APBD

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka pendek kecamatan yang disusun sebagaimana acuan untuk menyusun rencana kerja perangkat daerah tahun 2027.

Renja Kecamatan Kedungjati Tahun 2027 merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Kecamatan Kedungjati dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan 2025-2029.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungjati tidak hanya ditentukan dengan adanya dokumen Renja, melainkan dukungan dari sektor terkait lainnya dan masyarakat luas serta tuntutan kerja keras dari seluruh jajaran, sehingga harapan untuk mewujudkan visi dan misi dapat terwujud.

Kedungjati, 06 Januari 2026.

CAMAT KEDUNGJATI



KUSPRIYATI, SSTP, MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 197909201998102001